

EFEKTIVITAS PENDATAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS

Aditia Dwi Yana¹, Lina Marlioni², Sahadi³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : aditiadwiy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis ini berawal dari adanya permasalahan di dalam pendataan UMKM, yang ternyata belum dilaksanakan dengan cukup baik.. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan efektivitas pendataan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis?”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Adapun yang menjadi informan didalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Hasil penelitian pada Efektivitas pendataan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diketahui belum optimal, karena aplikasi yang kurang mumpuni, tidak adanya transparansi permasalahan yang dihadapi oleh dinas, kesanggupan petugas yang tidak konsisten, tidak semua petugas mempunyai android yang memadai, masih banyak petugas yang mempunyai umur yang kurang produktif, kurangnya komunikasi antar petugas lapangan, kurangnya aturan atau perintah yang jelas. Upaya yang dilakukan yaitu dengan dinas menyiapkan aplikasi dengan optimal, memberikan penjelasan secara transparan kepada petugas, Mencari pengganti untuk pegawai yang tidak memberikan kepastian dalam memulai pendataan, petugas di lapangan dapat meminjam android yang lebih menunjang untuk melakukan pendataan, dinas mengajukan waktu yang cukup kepada pusat agar dapat dilakukan pelatihan dengan baik sehingga bisa mencapai target yang sudah ditentukan, dinas membuat aturan dalam melakukan pendataan UMKM.

Kata Kunci : *Pendataan, Aplikasi, UMKM.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha semakin hari semakin kompetitif, hal ini berdampak dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi yang memberikan perubahan dalam berbagai kehidupan manusia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah kegiatan usaha yang mampu

memberikan atau memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. Usaha mikro kecil dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya stabilitas ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimana pemberdayaan UKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan serta memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 1 angka (1) Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah "usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini". Dengan adanya keberadaan kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) pada dasarnya merupakan sebuah sektor usaha yang dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terbentuknya lapangan pekerjaan akan memberikan dampak positif karena dapat mengurangi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut melakukan program pendataan kepada sektor usaha mikro kecil di daerahnya masing-masing melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis memiliki potensi industri kecil menengah yang dijadikan sebagai produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mana industri kecil menengah ini dikelola secara langsung oleh masyarakat. Maka dari itu dengan adanya pendataan UMKM ini

diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar tepat sasaran dan dapat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dalam bukunya menurut Makmur (2015:6) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ketetapan harapan, implementasi dan hal yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan dan dikantor Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Penulis menemukan beberapa indikator sebagai berikut: 1) Terdapat ketidaktepatan dalam melakukan pendataan UMKM, misalnya adanya kemunduran waktu dalam melakukan pendataan UMKM. 2) Rendahnya pemahaman petugas sensus dalam penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pendataan UMKM, misalnya kurangnya kompeten dalam melakukan tangging data tempat usaha 3) Sarana prasana yang kurang memadai dalam melakukan sensus UMKM, misalnya dibutuhkannya jaringan internet yang stabil dan alat komunikasi yang canggih sedangkan dalam sarana dan prasarana terdapat jarak UMKM yang jauh dan sulit ditempuh. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka memungkinkan penelitian untuk mencari tahu bagaimana efektivitas pendataan umkm oleh dinas koperasi, ukm dan perdagangan kabupaten ciamis agar lebih baik.

Adapun penjelasan mengenai efektivitas pendataan UMKM. Menurut Makmur (2015:7-9) menyatakan bahwa terdapat kriteria efektivitas

memiliki unsur-unsur antara lain: a. Ketepatan penentuan waktu yaitu dalam pendataan UMKM terdapat ketidakefektifan dalam pendataan UMKM terdapat penguluran waktu dalam memulai pendataan yang terdapat dalam perjanjian awal. b. Ketepatan perhitungan biaya. Dalam ketepatan perhitungan biaya mengenai pendataan UMKM tidak adanya transparansi mengenai ketepatan perhitungan biaya. c. Ketepatan dalam pengukuran. Dalam pendataan UMKM terdapat ketidak efektifan dalam ketepatan pengukuran seperti mitra atau petugas lapangan yang usianya kurang produktif sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Dalam memilih atau menyeleksi petugas pendataan UMKM yang ada dilapangan kurang tepat sehingga pendataan UMKM tidak berjalan dengan optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif .Kirk & Miller dalam Anggito & Setiawan (2018) mendefinisikan “Penelitian kualitatif adalah penilaian tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung dari observasi pada manusia, baik dalam peristilahannya maupun dalam kawasannya.”

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi

data adalah informan sebanyak 6 orang. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas akan bidangnya sehingga informasi dapat dipertanggungjawabkan

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendataan UMKM dapat dimaknai sebagai salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam langkah mengumpulkan data yang ada di Kabupaten Ciamis dan merupakan tugas dari pusat dan juga segala biaya ini didanai oleh pemerintahan pusat.

Efektivitas merupakan suatu proses agar mengetahui ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pendataan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, penulis melakukan penelitian dengan kriteria efektivitas menurut Makmur (2015, hlm. 7–9) yaitu :

1) Ketepatan Penentuan Waktu

Ketepatan penentuan waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah

pekerjaan. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas, dalam melakukan penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

a. Ketepatan waktu dalam melakukan pendataan UMKM di lapangan

Sebagaimana menurut Sutrisno (2007: 125-126) menyatakan bahwa:

“Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk indikator ketepatan waktu dalam melakukan pendataan UMKM di lapangan masih belum optimal. Mengingat waktu adalah hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan maka seyogyanya pendataan UMKM agar lebih efektif dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang agar tidak terjadi pengunduran waktu yang cukup lama. Karena sejauh ini dalam memulai pendataan masih terjadi pengunduran atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan waktu di awal terjadi pendataan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak sesuai dengan teori menurut Sutrisno.

Kurangnya kesiapan dalam mengembangkan *aplikasi*, terjadinya *tangging* yang tidak sesuai dengan tempat usaha berdiri dan keterlambatan dalam memberikan SK kepada enumerator merupakan faktor yang menghambat dalam pengunduran waktu dalam memulai pendataan.

b. Jadwal pendataan UMKM yang sistematis dan tepat dalam melakukan pendataan

Sebagaimana menurut Suwardjono (2011:170) menyatakan bahwa:

Mengenai ketepatan waktu dalam melakukan pendataan UMKM yang sistematis dan berdasarkan ketepatan waktu (*time liness*) yaitu Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan.

Dengan demikian, tidak terdapat transparansi dalam permasalahan yang dihadapi oleh dinas, baik itu *tangging* yang belum sesuai dan masih terjadi *blank spot* merupakan faktor yang menghambat ketepatan waktu dalam melakukan pendataan UMKM. Jadwal pendataan UMKM yang sistematis dan tepat belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Suwardjono. Karena tersedianya informasi bagi pembuat keputusan dalam pendataan ini belum memberikan keputusan yang jelas kepada para enumerator seperti yang terjadi di lapangan para enumerator memberikan keterangan bahwa keputusan dalam memulai pendataan yang dilakukan oleh dinas kepada

pegawai dilapangan masih kurang jelas contohnya tidak adanya kepastian dalam memulai pendataan sehingga para petugas dilapangan kebingungan. Kemudian juga waktu yang sangat singkat merupakan faktor yang membuat pendataan ini tidak berjalan dengan sistematis karena dinas dan petugas dilapangan merasa terburu-buru dalam melakukan pendataan.

2) Ketepatan Penentuan Biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, organisasi maupun kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam perhitungan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya, bila mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan perhitungan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

a. Ketepatan dalam penggunaan SOP anggaran

Menurut Hansen dan Mowen (2012 : 47) menyatakan bahwa “Biaya (cost) adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi”.

Dengan demikian, bahwa untuk indikator ketepatan dalam penggunaan SOP anggaran ini sudah berjalan

dengan baik, karena biaya yang sudah sesuai untuk menjalankan pendataan. Indikator ini senada dengan teori yang dikemukakan Hansen dan Mowen yang mana dengan adanya biaya yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi masa depan organisasi.

b. Ketepatan Menentukan Gaji Atau Upah Petugas Dilapangan

Sebagaimana menurut teori Vroom (dalam Wicaksana, 2021: 241) menyatakan tentang pentingnya menghubungkan antara kinerja dengan upah untuk memotivasi kinerja karyawan, model penghargaan memiliki tiga komponen utama yaitu :

a. Penghargaan itu sendiri

b. Instrumentality

c. Valensi.

Dengan demikian, dalam indikator ketepatan menentukan gaji atau upah petugas dilapangan sudah optimal, hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor yang sudah sesuai dengan teori menurut Vroom.

Sejauh ini dalam menentukan gaji atau upah kepada petugas merupakan salah satu bentuk memotivasi kepada para petugas di lapangan karena diharapkan petugas dapat menjalankan tugasnya agar para petugas bisa menjalankan tugasnya dengan optimal.

3) Ketepatan dalam Pengukuran

Dengan ketetapan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

a. Kesanggupan Petugas pendataan dalam menyelesaikan pekerjaan

Sebagaimana menurut Shein (1980) dalam buku Ismail Nawawi Uha (2017:187) mengatakan bahwa: “Efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya”.

Dengan demikian indikator kesanggupan petugas sensus dalam menyelesaikan pekerjaan sejauh ini belum optimal. Mengingat kemampuan bertahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam efektivitas. Sejalan ini dalam menjalankan pendataan dilapangan masih terjadi pengunduran diri yang dilakukan oleh para petugas, hal ini merupakan salah satu faktor yang tidak sesuai dengan teori menurut Shein. Seyogyanya pegawai dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya sehingga tidak lepas tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk bertahan.

b. Pengukuran dalam pengelompokan pelaku usaha UMKM yang ada di lapangan

Menurut Hesti Respatiningsih (2022:5) menyatakan UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activity*,
2. *Micro Enterprise*,
3. *Small Dynamic Enterprise*.,
4. *Fast Moving Enterprise*,

Dengan demikian, bahwa untuk indikator pengelompokan pelaku usaha

UMKM yang ada di lapangan sudah sesuai dengan teori dikemukakan oleh Tambunan.

pengukuran pengelompokan pelaku usaha UMKM di lapangan ini merupakan hal yang sangat penting untuk data yang saat dikumpulkan ketika melakukan pendataan. Sejalan ini dalam melakukan pendataan UMKM sudah dilakukan pengelompokan dan sudah sesuai dengan faktor-faktor yang dikatakan oleh Hesti, seperti *livelihood activity* merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, *micro enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan dan *fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).klasifikasi UMKM ini berpengaruh terhadap UMKM yang ada di lapangan.

4) Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyelesaian dikemudian hari. Sebalik bahwa ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya

- a. Ketepatan dalam menggunakan android yang memadai dalam melakukan pendataan UMKM.

Sebagaimana menurut Munir (2007: 131) menyatakan bahwa :

Menfasilitasi kinerja yang hendak dicapai. Apabila proses pertama telah dilakukan, manajer administrasi hendaknya memberikan feedback kepada pegawai mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka sesuai target yang ditetapkan.

Dengan demikian dalam indikator ketepatan dalam menggunakan android yang memadai belum optimal. Menfasilitasi kinerja dalam melakukan pendataan, sejauh ini belum dilakukan oleh dinas UMKM kepada para petugas yang tidak mempunyai *android* memadai. Oleh karena itu faktor tersebut belum sesuai dengan teori menurut Munir. Adanya ketepatan dalam menggunakan *android* yang memadai dalam melakukan pendataan merupakan bagian dari sebuah fasilitas kerja hal yang sangat penting dalam melakukan pendataan karena ketika *android* atau fasilitas yang tidak memadai maka dapat mengakibatkan kurang optimalnya dalam pendataan.

- b. Ketepatan pemilihan kualitas dan kuantitas SDM dalam melakukan pendataan

Sebagaimana menurut Sutrisno (2007: 125-126), menyatakan bahwa:

Pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami.

Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut.

Dengan demikian dalam indikator pemilihan kualitas dan kuantitas SDM dalam melakukan pendataan UMKM sejauh ini belum optimal. Mengingat pemahaman program merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu dalam melakukan pendataan para petugas masih belum memahami program yang dimaksud, oleh karena itu seyogyanya dinas memberikan pelatihan sebelum dilakukannya pendataan agar berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu faktor inilah yang tidak sesuai dengan teori Sutrisno. Jika pelaksanaan pemilihan kualitas dan kuantitas SDM ingin efektif, maka dinas seharusnya memberikan pelatihan terhadap para petugas di lapangan sehingga semua petugas di lapangan bisa paham terhadap program pendataan ini.

5) Ketepatan dalam Pengukuran

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

- a. Ketepatan berpikir dalam bentuk kerja sama antar petugas dalam proses pendataan UMKM

Sebagaimana menurut Ismail Nawawi Uha (2017:190) menyatakan bahwa:

Pada pandangan efektivitas kelompok, penekanannya adalah pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja sebab di samping bekerja sendiri, pada kenyataannya individu biasanya bekerja bersama-sama di dalam kelompok. Dengan demikian, yang dimaksud dengan efektivitas kelompok adalah kontribusi dari semua anggotanya.

Dengan demikian indikator ketepatan berfikir dalam bentuk kerja sama antar petugas dalam proses pendataan UMKM belum optimal, pada kenyataannya kerjasama antar petugas di lapangan masih kurang optimal sehingga menjadi faktor penghambat dalam pendataan, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi Uha karena bentuk kerjasama antar petugas merupakan hal yang penting dalam menjalankan pendataan ini.

b. Cara berfikir masyarakat terkait pendataan UMKM

Menurut Suryono (2019:39) menyatakan bahwa:

Cara berpikir yang berorientasi pada masa depan ada hubungannya dengan visi yang ingin dicapai, oleh suatu institusi dan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan ke depan dari institusi dan masyarakat tersebut tidak ada jalan lain kecuali harus melakukan gerakan perubahan (restorasi), ke arah kondisi yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan keadaan sebelumnya.

Dengan demikian, bahwa cara berpikir masyarakat terhadap pendataan sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Suryono, karena dengan mengubah cara berfikir masyarakat pendataan ini dapat berjalan dengan baik. Mengubah pola berpikir masyarakat sangatlah berpengaruh karena ketika pola pemikiran masyarakat yang salah mengartikan sehingga akan terjadi hambatan dalam melakukan pendataan. Memberikan pemahaman dan penjelasan yang dilakukan oleh enumerator kepada pelaku usaha UMKM menjadi hal yang wajib disampaikan sebelum dimulainya pendataan yang mendalam.

6) Ketepatan dalam menentukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

a. Perintah atau wewenang yang mengatur tentang program pendataan UMKM

Sebagaimana menurut Muasaroh (2010: 13) mengatakan bahwa “aspek tugas atau fungsi, efektivitas suatu

program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya”.

Dengan demikian, perintah atau wewenang dalam melakukan pendataan UMKM terkait dengan surat kerja yang diedarkan untuk petugas masih diragukan oleh masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muasaroh, yang mana efektivitas suatu program seyogyanya dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan tersebut, sehingga masyarakat tidak merasa ragu. Dinas membekali SK yang jelas dalam berlangsungnya proses kegiatan pendataan ini kurang optimal.

b. Kejelasan perintah dari pemerintah pusat mengenai jumlah atau target pelaku usaha yang harus dilakukan pendataan

Sedangkan menurut Henry L Giant (dalam Dian Ari, 2017 :14) berpendapat bahwa ada empat gagasan peningkatan manajemen yaitu :

- a. Kerjasama yang baik antara pemimpin dan para pekerja,
- b. Seleksi ilmiah tenaga kerja,
- c. Memberikan insentif kepada para pekerja agar lebih produktif dalam bekerja dan
- d. Penggunaan instruksi-intruksi kerja yang jelas dan terperinci.

Dengan demikian, bahwa kejelasan perintah dari pemerintah pusat mengenai jumlah atau target pelaku usaha sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Henry L Giant. Karena dalam instruksi-instruksi sudah jelas

dan terperinci sehingga pegawai mudah memahami perintah yang diberikan oleh dinas. kejelasan target dari pemerintah pusat dalam melakukan pendataan meruakan hal yang penting dalam menjalankan pendataan, karena ketika mereka mempunyai tagetnya maka petugas memiliki tanggung jawabnya sebagai petugas pendataan UMKM.

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

a. Tujuan yang jelas dalam pelaksanaan program pendataan UMKM

Sebagaimana menurut Sutrisno (2007: 125-126) menyatakan bahwa „Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai”.

Dengan demikian bahwa kejelasan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan program pendataan UMKM ini sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sutrisno. Karena sejauh ini dalam melakukan pendataan, petugas sudah mengetahui tujuan yang ditentukan sejak awaL yaitu sebagai mencari data saja, maka data tersebut nantinya bisa digunakan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang ketika akan ada bantuan yang turun untuk para pelaku usaha UMKM.

b. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pencapaian tujuan pendataan UMKM

Sebagaimana menurut Bambang Wahyudi (dalam Rismawati & Mattalata, 2018:7) menyatakan bahwa “Evaluasi kinerja adalah penentuan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Selanjutnya sebagaimana menurut Henry Simamora (dalam Rismawati & Mattalata, 2018:7) menyatakan bahwa „Evaluasi kerja adalah proses yang dipakai oleh perusahaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan.“

Dengan demikian, Teori yang dinyatakan oleh Bambang dan Henry sudah sesuai dengan strategi yang akan dilakukan oleh dinas yaitu mengadakan evaluasi kinerja pegawai. Dengan diadakannya evaluasi kinerja maka dinas akan mengetahui kekurangan atau hambatan apa saja yang dihadapi di lapangan. Kejelasan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan program pendataan dengan bertujuan mencari data yang real, maka data tersebut nantinya bisa digunakan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang ketika akan ada bantuan yang turun untuk para pelaku usaha UMKM.

8) Ketepatan ketepatan sasaran.

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka

pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan ini kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

a. Ketepatan dalam pemenuhan persyaratan dan kriteria pelaku UMKM

Sebagaimana menurut Robbins (Nawawi Uha. 2017:187) mengatakan bahwa efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.“

Dengan demikian, bahwa ketepatan dalam pemenuhan persyaratan dan kriteria pelaku UMKM sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Robbins. Dengan adanya pengelompokan UMKM yang dilakukan oleh Dinas UMKM bagi pelaku usaha akan dapat memajukan kelompok UMKM baik dalam jangka pendek ataupun panjang, hal ini merupakan hal yang terpenting karena dalam pemenuhan ketepatan dan persyaratan kriteria pelaku usaha sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan sehingga dapat di jadikan sebagai data pendek ataupun data panjang dalam sebuah pencapaian organisasi.

b. Ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sebagaimana menurut Robbins (Nawawi Uha. 2017:187) mengatakan bahwa efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang."

Dengan demikian, bahwa ketepatan dalam pemenuhan persyaratan dan kriteria pelaku UMKM sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Robbins. Dengan adanya pengelompokan UMKM yang dilakukan oleh Dinas UMKM bagi pelaku usaha akan dapat memajukan kelompok UMKM baik dalam jangka pendek ataupun panjang, hal ini merupakan hal yang terpenting karena dalam pemenuhan ketepatan dan persyaratan kriteria pelaku usaha sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan sehingga dapat di jadikan sebagai data pendek ataupun data panjang dalam sebuah pencapaian organisasi.

c. Ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sebagaimana menurut Helaludin dan Henki Wijaya (2019:135) mengatakan bahwa Untuk mengetahui data yang akurat dan tepat sasaran maka harus mengumpulkan data yang benar, aktual, akurat, dan lengkap".

Dengan demikian, ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan UMKM sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Helaludin dan Henki Wijaya, karena ketika akan memberikan bantuan maka data yang ada sudah akurat, benar dan lengkap

sesuai dengan apa yang ada di lapangan sehingga tidak ada data yang dimanipulatif. Sebaiknya pemerintah melakukan analisis data terkait dengan pendataan yang sudah dilakukan oleh pegawai dilapangan, apakah pendataan tersebut tepat sasaran atau tidak.

KESIMPULAN

Dari Efektivitas pendataan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara diketahui belum optimal, dimana dari 8 dimensi dan 16 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, ada 7 indikator yang berjalan dengan baik dan ada 9 indikator yang belum berjalan dengan baik. Seperti: ketepatan waktu dalam melakukan pendataan UMKM di lapangan, Jadwal pendataan UMM yang sistematis dan tepat dalam melakukan pendataan, kesanggupan petugas sensus dalam menyelesaikan pekerjaan, ketepatan dalam menggunakan android yang memadai dalam melakukan pendataan UMKM, ketepatan pemilihan kualitas dan kuantitas dalam melakukan pendataan, Kepatan berfikir dalam bentuk kerja sama antar petugas dalam proses pendataan UMKM, Perintah atau wewenang yang mengatur tentang program pendataan UMKM, Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pencapaian tujuan pendataan UMKM.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dari hasil observasi dan wawancara antara lain: aplikasi yang

kurang siap, tidak adanya transparansi permasalahan yang dihadapi oleh dinas, kesanggupan petugas yang tidak konsisten, tidak semua petugas di lapangan mempunyai android yang memadai, masih banyak petugas yang mempunyai umur yang kurang produktif, petugas dilapangan tidak saling berkomunikasi satu sama lain, kurangnya aturan atau perintah yang jelas ketika akan melakukan pendataan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Helaludin, Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffay
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan (Vol. 2)*. Bandung. Refika Aditama.
- Mattalata, rismawati. *Evaluasi kinerja penilaian kinerja dasar prestasi kerja berorientasi kedepan*. Makassar: Celebes media perkasa
- Sukoco Munir Badri. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantorn Modern*. Jakarta Timur. PT Gelora Aksara Pratama
- Suryono. 2019. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta Timut: PT Bumi Aksara
- Sutrisno. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wicaksana A Seta. 2021. *Manajemen Pengembangan Talenta*. Riau. DD Publishing dan Humanika Institute Publisher
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas badan penanggulangan bencana daerah. *Journal of management Review*
- Rachmawati, S. (2008). Pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap audit delay dan timeliness. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 10(1), 1-10.
- Wibowo, S. B. (2012). Analisis Estimasi Cost-Volume-Profit (CVP) Dalam Hubungannya Dengan Perencanaan Laba Pada Hotel Tlogo Mas Sarangan. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.